ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Strategi Antisipatif Mendeteksi Bencana Buatan Manusia: Konflik Sosial dan Disinformasi Digital Menjelang Pemilu Indonesia

Harun[1], Harri Dolli Hutabarat[2], Sutanto[3]
[1,2,3]Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia
E-mail: harun@idu.ac.id[1] , harri.hutabarat@idu.ac.id[2] , sutanto@idu.ac.id[3]

Article History:
Received: 27 Oktober 2026
Revised: 30 Oktober2026
Accepted: 03 November 2026

Keywords: *Strategi Antisipatif, Disinformasi Digital, Intelijen Bencana, Pemilu, Bencana Sosial.*

Abstrak: *Bencana buatan manusia mencakup konflik sosial yang dipicu oleh manipulasi informasi di ranah digital. Menjelang pemilihan umum, disinformasi, ujaran kebencian, dan politik identitas dapat memperdalam polarisasi dan memicu konflik horizontal, yang menurut hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai bencana sosial. Studi ini menganalisis strategi antisipasi untuk mendeteksi ancaman tersebut, menggunakan konflik sosial dan disinformasi digital menjelang pemilihan umum di Indonesia sebagai studi kasus. Studi ini menerapkan tinjauan pustaka kualitatif semi-sistematis dari 25 sumber yang diterbitkan antara tahun 2016 dan 2026. Temuan menunjukkan bahwa disinformasi pemilu di Indonesia bersifat berulang dan berpola, mulai dari pemilihan gubernur Jakarta 2017 dan pemilihan umum 2019 hingga pemilihan umum 2024, ketika konten deepfake muncul. Ancaman ini diperkuat oleh polarisasi politik, ruang gema algoritmik, dan literasi digital yang moderat. Antisipasi yang efektif bertumpu pada enam komponen: intelijen bencana berdasarkan indikator kerentanan, pemantauan big data dan kecerdasan buatan, peringatan dini prediktif, literasi digital dan pencegahan penyebaran informasi, kolaborasi multi-pemangku kepentingan, dan tata kelola berbasis hak. Studi ini menyimpulkan bahwa deteksi dini bencana sosial terkait pemilu memerlukan integrasi pendekatan keamanan, teknologi, dan ketahanan masyarakat, yang dikoordinasikan dengan baik sebelum tahapan pemilu dimulai.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya. Kajian sistematis atas riset kebencanaan di Indonesia memetakan perkembangan penelitian yang pesat mengenai bahaya alam, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim (Djalante, 2018). Padahal, risiko bencana juga dapat bersumber dari aktivitas manusia yang dampaknya terhadap korban jiwa, kerugian harta benda, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sama luasnya sehingga perlu dikelola dalam kerangka

pengurangan risiko bencana yang sama.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana ke dalam tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana sosial didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tetapi upaya mitigasi bencana sosial di Indonesia dinilai masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan sistem intelijen yang adaptif terhadap dinamika sosial (Siahaan, Alexandra, Sagala, Setiawibawa, & Uksan, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan dimensi baru dalam pembentukan ancaman bencana sosial. Media sosial memungkinkan informasi menyebar secara cepat, masif, dan lintas batas wilayah tanpa melalui proses verifikasi. Studi berskala besar terhadap jutaan unggahan di Twitter membuktikan bahwa berita palsu menyebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas dibandingkan berita yang benar, terutama pada kategori berita politik (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018).

Dalam konteks Indonesia, momentum pemilihan umum menjadi periode yang paling rentan terhadap eskalasi disinformasi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 memperlihatkan bagaimana media sosial membentuk ruang gema algoritmik (*algorithmic enclaves*) yang mempertemukan kelompok sepaham, memperkuat sentimen identitas, dan memberi ruang bagi ekspresi kebencian terhadap kelompok lain. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai nasionalisme kesukuan (*tribal nationalism*) yang berpotensi menggerus kohesi sosial (Lim, 2017).

Pola polarisasi tersebut berlanjut dan menguat pada Pemilu 2019. Kontestasi pemilihan presiden pada tahun tersebut membelah pemilih berdasarkan garis identitas keagamaan sehingga polarisasi dalam perilaku memilih mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak dekade 1950-an. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetisi elektoral yang sah sekalipun dapat menghasilkan keretakan sosial yang dalam apabila disertai mobilisasi identitas yang intensif (Aspinall & Mietzner, 2019).

Data pemerintah memperlihatkan bahwa disinformasi pemilu merupakan ancaman yang berulang. Pada periode Pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 714 isu hoaks yang beredar sepanjang 2018 hingga 2019, sedangkan dalam rentang Januari 2023 hingga Januari 2024 tercatat 204 isu hoaks terkait Pemilu 2024. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa angka tersebut belum memotret seluruh dinamika pemilu dan masih berpotensi meningkat seiring berjalannya tahapan (Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo], 2024).

Pemilu 2024 juga menandai kemunculan ancaman berbasis kecerdasan artifisial generatif. Berbagai gambar, video, dan suara rekayasa (*deepfake*) yang menampilkan tokoh politik beredar selama masa kampanye. Survei panel nasional menemukan bahwa paparan dan tingkat kepercayaan pemilih terhadap konten *deepfake* sangat dipengaruhi oleh preferensi partisan sehingga konten sintetis berpotensi sama memecah-belahnya dengan disinformasi konvensional (Muhtadi & Wihardja, 2024).

Kajian mengenai disinformasi pemilu di Indonesia selama ini cenderung terpisah ke dalam beberapa ranah disiplin. Studi komunikasi banyak membahas karakteristik hoaks dan perilaku pengguna media sosial, studi politik membahas polarisasi dan regresi demokrasi, sedangkan studi keamanan membahas fungsi intelijen dan penegakan hukum. Analisis yang mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka tata kelola risiko masih terbatas, padahal ancaman berbasis informasi bersifat hibrida dan menuntut respons lintas sektor (Fatmawati, Salam, Susanti, Sulaeman, & Rafa, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi antisipatif dalam mendeteksi ancaman bencana buatan manusia di Indonesia dengan studi kasus konflik sosial dan disinformasi digital menjelang pemilu. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola ancaman yang terdokumentasi dalam literatur, merumuskan komponen strategi antisipatif, serta memetakan tantangan implementasinya. Kontribusi yang diharapkan adalah kerangka deteksi dini yang menempatkan konflik sosial akibat disinformasi pemilu sebagai bagian dari manajemen risiko bencana, sejalan dengan pandangan bahwa risiko sistemik hanya dapat dikelola melalui kombinasi berbagai indikator dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan (Renn et al., 2022).

LANDASAN TEORI

Bencana buatan manusia (*human-made disaster*) adalah bencana yang bersumber dari tindakan manusia, baik disengaja maupun tidak, termasuk konflik sosial, terorisme, dan gerakan separatis. Pengelolaan bencana jenis ini memerlukan intelijen bencana buatan manusia (*human-made disaster intelligence*), yaitu kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi tentang potensi ancaman yang bersumber dari manusia sebagai dasar pengambilan keputusan penanggulangan bencana sosial (Maharani, Sarjito, Marnani, Almubaroq, & Falefi, 2023).

Istilah berita palsu (*fake news*) digunakan secara beragam dalam literatur. Kajian terhadap puluhan definisi akademik mengelompokkan berita palsu ke dalam enam tipe, yaitu satire berita, parodi berita, fabrikasi, manipulasi, iklan, dan propaganda, berdasarkan dua dimensi utama, yakni tingkat faktisitas dan niat untuk menipu (Tandoc, Lim, & Ling, 2018). Dalam konteks pemilu, fabrikasi, manipulasi, dan propaganda menjadi bentuk yang paling berbahaya karena memadukan rendahnya faktisitas dengan tingginya niat menipu, sehingga ketiganya dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai disinformasi.

Hoaks politik di Indonesia tidak hanya bekerja sebagai kebohongan faktual, tetapi juga sebagai praktik memetik yang membangun keyakinan bersama di dalam komunitas tertentu. Kajian atas hoaks pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa hoaks menjadi sarana partisan di tengah meningkatnya polarisasi. Kecenderungan hoaks untuk mengalahkan kebenaran dan membuat orang enggan memercayai fakta menjadikannya ancaman bagi demokrasi partisipatoris (Utami, 2018).

Ancaman yang bersumber dari disinformasi dan polarisasi memiliki karakter krisis yang merayap (*creeping crisis*). Krisis jenis ini adalah ancaman terhadap nilai bersama atau sistem vital masyarakat yang berkembang perlahan, biasanya didahului tanda-tanda peringatan, tetapi hanya mendapat perhatian yang tidak merata dari publik maupun politisi sehingga respons otoritas cenderung parsial atau tidak memadai (Boin, Ekengren, & Rhinard, 2020). Konsep ini relevan karena menempatkan kemampuan membaca tanda peringatan dini sebagai inti pencegahan krisis.

Disinformasi pemilu juga dapat dipahami sebagai risiko sistemik. Risiko sistemik bersifat kompleks, mengandung ketidakpastian tinggi, dan menjalar dari satu sistem ke sistem lain, misalnya dari ekosistem informasi ke stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi. Pengelolaannya menuntut perpaduan model kompleksitas dengan bukti empiris, penggunaan berbagai indikator, dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan (Renn et al., 2022).

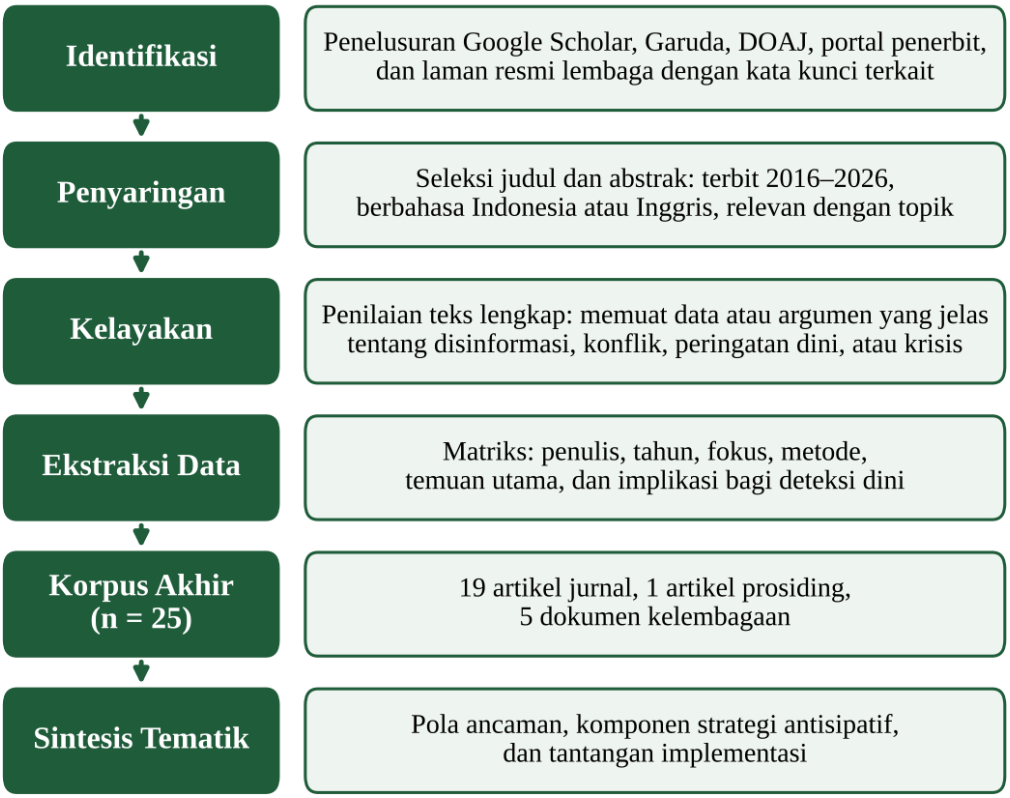
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur

(*literature review*). Jenis tinjauan yang dipilih adalah tinjauan semisistematis, yaitu tinjauan yang dirancang untuk memetakan topik yang dikaji dari berbagai disiplin dengan pendekatan konseptual yang beragam, kemudian menyintesisnya secara tematik. Pendekatan ini tepat digunakan karena topik disinformasi pemilu dan bencana sosial dikaji oleh bidang komunikasi, ilmu politik, studi keamanan, dan manajemen bencana dengan kerangka yang berbeda-beda (Snyder, 2019).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen resmi kelembagaan. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, portal penerbit jurnal, serta laman resmi Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kata kunci yang digunakan antara lain "bencana sosial", "konflik sosial pemilu", "hoaks pemilu", "disinformasi", "deteksi dini konflik", "intelijen bencana", *election disinformation*, *deepfake Indonesia*, dan *early warning system*. Tinjauan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan mensyaratkan prosedur penelusuran yang terdokumentasi, kriteria seleksi yang eksplisit, serta sintesis yang menghasilkan pemahaman baru atas suatu bidang kajian (Paul & Criado, 2020).

Kriteria inklusi meliputi sumber yang terbit pada rentang 2016–2026, berbahasa Indonesia atau Inggris, tersedia dalam teks lengkap, serta membahas disinformasi, polarisasi, konflik sosial, peringatan dini, atau manajemen krisis yang relevan dengan konteks pemilu. Sumber dikeluarkan apabila berupa opini tanpa dasar data atau tidak memiliki identitas penerbit yang jelas. Seleksi dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan teks lengkap, ekstraksi data ke dalam matriks, dan sintesis tematik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 (Snyder, 2019).



Gambar 1. Alur Tahapan Tinjauan Literatur

Korpus akhir terdiri atas 25 sumber, yaitu 19 artikel jurnal, satu artikel prosiding, dan lima dokumen kelembagaan. Untuk menjaga kredibilitas temuan, peneliti melakukan triangulasi sumber

dengan membandingkan temuan akademik dan data kelembagaan, misalnya membandingkan kajian mengenai polarisasi dengan data indeks kerawanan pemilu dan data penanganan hoaks pemerintah. Hasil sintesis kemudian dirumuskan menjadi kerangka konseptual, sesuai dengan fungsi tinjauan literatur sebagai sarana membangun kerangka dan agenda penelitian lanjutan (Paul & Criado, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Ancaman Disinformasi dan Konflik Sosial Menjelang Pemilu

Kerentanan Indonesia terhadap disinformasi pemilu berakar pada kondisi struktural demokrasinya. Sejumlah kajian menilai demokrasi Indonesia mengalami regresi bertahap akibat kombinasi faktor struktural, perilaku elite, dan sikap sebagian masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik iliberal. Polarisasi yang tajam antara kubu pluralis dan kubu Islamis turut membentuk lingkungan elektoral yang kondusif bagi penyebaran narasi yang memecah belah (Warburton & Aspinall, 2019).

Kerentanan terhadap disinformasi juga tidak terbatas pada kelompok yang selama ini dianggap rentan. Survei nasional berulang selama Pemilu Presiden 2019 menemukan bahwa responden yang lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih mapan secara ekonomi justru lebih cenderung memercayai misinformasi, baik yang menyerang petahana maupun penantangnya. Temuan ini berbeda dari pola di Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga program pencegahan di Indonesia tidak dapat hanya menyasar kelompok usia tua atau berpendidikan rendah (Mujani & Kuipers, 2020).

Pada Pemilu 2019, penyebaran informasi palsu terlihat jelas melalui kampanye tagar di media sosial. Studi komparatif terhadap tagar politik pada Pemilu Presiden Indonesia 2019 dan Pemilu Malaysia 2018 menunjukkan bahwa informasi palsu turut membentuk arah wacana politik di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa tagar dan pola amplifikasinya merupakan sinyal penting yang dapat dipantau dalam sistem deteksi dini (Jalli & Idris, 2019).

Menjelang Pemilu 2024, pemetaan oleh organisasi masyarakat sipil memperlihatkan pergeseran tema hoaks dari isu kesehatan ke isu politik. Hoaks politik tidak hanya menyerang kandidat, tetapi juga menyasar penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, serta berupaya mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu. Pola ini penting karena delegitimasi penyelenggara dapat menjadi pemicu penolakan hasil pemilu dan mobilisasi massa pada tahap pascapemungutan suara (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia [Mafindo], 2023).

Dari sisi kelembagaan, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatat lima provinsi atau 15 persen berada pada kategori kerawanan tinggi, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi paling rawan, serta 85 kabupaten/kota atau sekitar 16,5 persen berkategori rawan tinggi. Dimensi penyelenggaraan pemilu memperoleh skor tertinggi sebesar 54,27, disusul dimensi konteks sosial politik sebesar 46,55, sedangkan penggunaan platform digital ditetapkan sebagai salah satu isu strategis yang harus dimitigasi (Badan Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu], 2022).

Ancaman terbaru datang dari konten sintetis berbasis kecerdasan artifisial. Tinjauan sistematis terhadap 30 studi akademik dan 12 dokumen kebijakan menemukan bahwa dampak *deepfake* tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknisnya, tetapi oleh interaksinya dengan bias politik, literasi verifikasi yang lemah, algoritma platform, ketidakpercayaan institusional, dan tata kelola yang terfragmentasi. Konten sintetis juga memunculkan *liar's dividend*, yaitu keadaan ketika bukti autentik dapat disangkal dengan dalih bahwa bukti tersebut merupakan hasil rekayasa

(Fatmawati et al., 2026).

Tabel 1. Sintesis Literatur tentang Pola Ancaman Disinformasi dan Konflik Sosial Pemilu

Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Implikasi bagi Deteksi Dini
Lim (2017)	Media sosial pada Pilkada DKI Jakarta 2017	Ruang gema algoritmik memperkuat sentimen identitas dan ekspresi kebencian	Pemantauan klaster narasi berbasis identitas
Utami (2018)	Hoaks politik Pilkada DKI Jakarta 2017	Hoaks bekerja sebagai praktik memetik dan sarana partisan	Analisis konten visual dan meme, bukan hanya teks
Aspinall & Mietzner (2019)	Pemilu 2019	Polarisasi keagamaan dalam perilaku memilih mencapai tingkat tertinggi sejak 1950-an	Polarisasi identitas sebagai indikator kerawanan
Jalli & Idris (2019)	Disinformasi pada Pemilu Indonesia 2019 dan Malaysia 2018	Informasi palsu melalui tagar turut membentuk wacana politik	Pemantauan tagar dan pola amplifikasi
Mujani & Kuipers (2020)	Kepercayaan pemilih terhadap misinformasi Pemilu 2019	Pemilih muda, berpendidikan, dan mapan lebih cenderung memercayai misinformasi	Sasaran literasi tidak hanya kelompok rentan konvensional
Bawaslu (2022)	Indeks Kerawanan Pemilu 2024	Lima provinsi dan 85 kabupaten/kota rawan tinggi; platform digital menjadi isu strategis	Basis spasial bagi prioritas peringatan dini
Kominfo (2024)	Penanganan hoaks pemilu	714 isu hoaks pada 2018–2019 dan 204 isu pada Januari 2023–Januari 2024	Data tren untuk menetapkan ambang peringatan
Muhtadi & Wihardja (2024)	*Deepfake* pada Pemilu 2024	Paparan dan kepercayaan terhadap *deepfake* dipengaruhi preferensi partisan	Respons dan klarifikasi yang tersegmentasi
Siahaan et al. (2025)	Intelijen strategis dan konflik SARA	Gejala awal konflik terbaca dari narasi kebencian, polarisasi, dan mobilisasi massa	Penguatan kapasitas dan koordinasi intelijen
Fatmawati et al. (2026)	*Deepfake* dan keamanan informasi	Celah regulasi dan munculnya *liar's dividend*	Verifikasi cepat dan penelusuran asal konten

Sumber: Hasil sintesis penulis dari literatur yang dikaji (2026).

Sintesis pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa ancaman bencana sosial menjelang pemilu mengikuti pola yang relatif dapat diprediksi. Kerentanan muncul dari tiga lapisan yang saling memperkuat, yaitu keretakan identitas di masyarakat, ekosistem informasi yang memudahkan amplifikasi narasi provokatif, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan untuk membaca sinyal awal. Kasus di Papua dan konflik pascapemilu menunjukkan bahwa ketika ketiga lapisan tersebut tidak diantisipasi secara terintegrasi, potensi konflik dapat berkembang menjadi bencana sosial (Siahaan et al., 2025).

Strategi Antisipatif dalam Mendeteksi Ancaman Bencana Buatan Manusia

a. Intelijen Bencana Berbasis Indikator Kerawanan

Komponen pertama strategi antisipatif adalah penguatan intelijen bencana buatan manusia. Intelijen bencana berbeda dari intelijen keamanan konvensional karena orientasinya adalah perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana, bukan semata penindakan. Kajian mengenai pengelolaan bencana sosial di Papua menegaskan bahwa informasi intelijen yang tepat waktu menjadi prasyarat bagi pengambilan keputusan dalam mencegah dan menanggulangi bencana sosial yang bersumber dari aktivitas manusia (Maharani et al., 2023).

Intelijen bencana memerlukan indikator yang terukur agar deteksi dini tidak bergantung pada intuisi semata. Literatur mengidentifikasi tiga gejala awal konflik berbasis SARA yang dapat dipantau, yaitu intensitas narasi kebencian, menguatnya polarisasi identitas, dan tanda-tanda

mobilisasi massa. Ketiga indikator tersebut perlu dipetakan secara berkala dan dihubungkan dengan pendekatan berbasis data agar peringatan dapat diberikan sebelum eskalasi terjadi (Siahaan et al., 2025).

b. Pemantauan Digital Berbasis Big Data dan Kecerdasan Artifisial

Komponen kedua adalah pemantauan ruang digital berbasis *big data*. Tinjauan sistematis terhadap pemanfaatan *big data* dalam manajemen bencana menunjukkan bahwa data dari berbagai sumber, termasuk media sosial, dapat digunakan untuk mendeteksi bahaya, memvisualisasikan situasi, dan memprakirakan perkembangan bencana pada setiap fase penanggulangan. Pemanfaatan tersebut mensyaratkan pengumpulan data dari beragam format dan penyimpanan yang tertata agar data tetap dapat digunakan lintas tahap respons (Yu, Yang, & Li, 2018).

Pemantauan digital perlu difokuskan pada fase awal penyebaran konten. Karena berita palsu menyebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan berita benar, jeda waktu antara kemunculan dan klarifikasi menjadi faktor penentu. Sistem deteksi dini idealnya mampu mengenali pola kaskade penyebaran, misalnya lonjakan tagar, keterlibatan akun-akun yang terkoordinasi, dan perpindahan konten antarplatform, sebelum konten provokatif menjangkau audiens yang luas (Vosoughi et al., 2018).

c. Sistem Peringatan Dini Prediktif

Komponen ketiga adalah pengembangan sistem peringatan dini yang bersifat prediktif. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem peringatan dini kekerasan politik dapat dibangun secara transparan, terbuka bagi publik, dan menghasilkan prakiraan bulanan hingga tingkat subnasional. Model semacam ini dapat diadaptasi di Indonesia dengan memadukan data struktural seperti riwayat konflik dan skor kerawanan dengan sinyal dinamis dari ruang digital sehingga peringatan dapat diberikan sebelum eskalasi terjadi (Hegre et al., 2019).

Di tingkat nasional, upaya penanganan disinformasi pemilu sebenarnya telah dijalankan melalui tiga level kegiatan. Pada tingkat hulu, pemerintah menjalankan Gerakan Nasional Literasi Digital, pada tingkat menengah dilakukan pengecekan fakta serta moderasi dan penurunan konten hoaks bersama platform digital, sedangkan pada tingkat hilir pemerintah mendukung penegakan hukum oleh Polri melalui penyediaan data dan informasi. Struktur tiga level ini dapat menjadi fondasi sistem peringatan dini apabila keluarannya dihubungkan dengan pemetaan kerawanan wilayah dan sistem informasi kebencanaan (Kominfo, 2024).

d. Penguatan Literasi Digital dan Prebunking

Komponen keempat adalah penguatan literasi digital masyarakat sebagai lapisan pertahanan paling dasar. Survei nasional menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia pada 2022 berada pada skor 3,54 dari skala 5 atau kategori sedang. Di antara empat pilar yang diukur, pilar keamanan digital memperoleh skor terendah, yaitu 3,12, sehingga kemampuan masyarakat melindungi diri dari manipulasi informasi masih perlu ditingkatkan (Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center, 2023).

Program literasi digital perlu dirancang berdasarkan pemahaman psikologis tentang mengapa orang memercayai dan membagikan berita palsu. Riset menunjukkan bahwa kerentanan terhadap berita palsu lebih banyak disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemikiran reflektif ketika mengonsumsi informasi daripada semata-mata oleh keberpihakan politik. Intervensi sederhana yang mengarahkan perhatian pengguna pada akurasi sebelum membagikan konten terbukti dapat menurunkan penyebaran informasi palsu (Pennycook & Rand, 2021).

Pendekatan pencegahan yang lebih proaktif adalah *prebunking* atau inokulasi psikologis. Melalui pendekatan ini, masyarakat diperkenalkan pada teknik manipulasi yang umum digunakan, seperti peniruan identitas, provokasi emosional, dan polarisasi, sebelum mereka benar-benar

terpapar disinformasi. Eksperimen berbasis permainan daring membuktikan bahwa pengalaman menjadi "produsen hoaks" secara simulatif meningkatkan kemampuan peserta mengenali dan menolak berita palsu (Roozenbeek & van der Linden, 2019).

Prebunking perlu dilengkapi dengan strategi klarifikasi yang tepat karena koreksi terhadap informasi keliru tidak selalu menghapus pengaruhnya. Informasi yang telah dikoreksi sering kali tetap memengaruhi penalaran seseorang, terutama bila berkaitan dengan identitas dan pandangan dunianya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan disinformasi memerlukan pendekatan *technocognition*, yaitu perpaduan antara rancangan teknologi informasi dan prinsip-prinsip psikologi kognitif (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017).

Pada tingkat komunitas, antisipasi hoaks dapat dilakukan melalui kebiasaan memverifikasi sumber, menahan diri untuk tidak meneruskan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan melaporkan konten bermasalah melalui kanal resmi. Interaksi komunikasi hoaks di media sosial menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu sangat bergantung pada partisipasi pengguna biasa sehingga masyarakat merupakan aktor kunci dalam memutus rantai penyebarannya (Juditha, 2018).

e. Kolaborasi Multipihak

Komponen kelima adalah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BNPB dan BPBD, Bawaslu, KPU, Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kementerian Komunikasi dan Informatika), Polri, TNI, BIN, BSSN, pemerintah daerah, platform digital, organisasi pemeriksa fakta, akademisi, serta tokoh agama dan adat. Kolaborasi ini memerlukan basis data bersama agar setiap lembaga bekerja berdasarkan peta risiko yang sama. Indeks Kerawanan Pemilu dapat berfungsi sebagai basis bersama tersebut karena dirancang sebagai dasar program pencegahan dan pengawasan sekaligus sarana pelibatan tokoh lokal, misalnya tokoh adat di Papua, dalam mencegah konflik (Bawaslu, 2022).

Kolaborasi tersebut perlu dilembagakan sejak tahap paling awal, bukan dibentuk secara mendadak ketika eskalasi sudah terjadi. Ancaman disinformasi pemilu menunjukkan ciri krisis yang merayap, yakni tanda peringatan sudah muncul jauh hari, tetapi perhatian publik dan politisi tidak merata sehingga respons otoritas cenderung parsial. Oleh sebab itu, mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan jalur komunikasi publik harus disepakati sebelum tahapan pemilu dimulai (Boin et al., 2020).

f. Tata Kelola Berbasis Hak Asasi Manusia

Komponen keenam adalah tata kelola yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai bagian dari keamanan. Pemantauan ruang digital oleh negara harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan diawasi secara independen. Regulasi perlu membedakan secara tegas antara penipuan yang merugikan, peniruan identitas, dan manipulasi pemilu di satu sisi dengan satire, parodi, jurnalisme, dan kritik politik yang sah di sisi lain, karena kebijakan antidisinformasi yang terlalu luas berisiko membatasi ekspresi demokratis (Fatmawati et al., 2026).

Tabel 2. Kerangka Strategi Antisipatif Deteksi Dini Bencana Sosial Berbasis Tahapan Pemilu

Tahapan	Indikator yang Dipantau	Instrumen Antisipatif	Aktor Utama
Pratahapan (12–24 bulan sebelum pemungutan suara)	Riwayat konflik, skor IKP, segregasi identitas, kapasitas penyelenggara	Pemetaan kerawanan wilayah, profil risiko, literasi digital, dan *prebunking*	Bawaslu, BNPB/BPBD, Kesbangpol, BIN, akademisi
Kampanye	Lonjakan narasi SARA, akun terkoordinasi, konten *deepfake*, ujaran kebencian	Pemantauan media sosial berbasis AI, cek fakta, penurunan konten, klarifikasi resmi	Komdigi, Bawaslu, Polri, BSSN, platform digital, pemeriksa fakta

Tahapan	Indikator yang Dipantau	Instrumen Antisipatif	Aktor Utama
Pemungutan dan penghitungan suara	Narasi kecurangan, delegitimasi penyelenggara, seruan mobilisasi	Pusat situasi terpadu, kanal verifikasi cepat, kesiagaan aparat	KPU, Bawaslu, Polri, TNI, pemerintah daerah
Pascapenetapan hasil	Penolakan hasil, mobilisasi massa, provokasi lanjutan	Dialog tokoh, mediasi, komunikasi krisis, pemulihan kepercayaan	Pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama dan adat, Polri

Sumber: Dirumuskan penulis berdasarkan sintesis literatur (2026).

Kerangka pada Tabel 2 menegaskan bahwa deteksi dini bencana sosial bukan kegiatan sesaat, melainkan siklus yang berjalan sepanjang tahapan pemilu. Kerangka tersebut dapat diintegrasikan dengan siklus manajemen bencana, yaitu tahap prabencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat ketika konflik terjadi, serta tahap pascabencana yang berfokus pada pemulihan kohesi sosial. Integrasi ini sejalan dengan temuan bahwa pemanfaatan data dalam manajemen bencana memberikan nilai terbesar ketika dirancang untuk mendukung seluruh fase, dari deteksi hingga pemulihan (Yu et al., 2018).

Tantangan Implementasi

Tantangan pertama berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. Efektivitas intelijen strategis dalam membaca gejala awal konflik masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Tanpa peningkatan kapasitas analis, investasi pada perangkat pemantauan digital berisiko menghasilkan data yang melimpah tetapi tidak diolah menjadi peringatan yang dapat ditindaklanjuti (Siahaan et al., 2025).

Tantangan kedua berkaitan dengan regulasi dan teknologi. Indonesia belum memiliki definisi hukum yang secara khusus mengatur *deepfake* politik sehingga penanganannya tersebar pada berbagai instrumen, seperti hukum informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hukum pemilu. Fragmentasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai lembaga yang berwenang memverifikasi konten, memerintahkan penurunan konten, menyimpan barang bukti, dan menyampaikan klarifikasi kepada publik (Fatmawati et al., 2026).

Tantangan ketiga bersifat politis. Dalam lingkungan demokrasi yang mengalami regresi, penguatan kapasitas pemantauan negara berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, misalnya untuk mengawasi oposisi atau membatasi kritik. Risiko ini menuntut adanya mekanisme akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, dan kejelasan mandat setiap lembaga agar sistem deteksi dini tetap berada dalam koridor demokrasi (Warburton & Aspinall, 2019).

Tantangan keempat berkaitan dengan perilaku pemilih. Karena kepercayaan terhadap disinformasi dan *deepfake* dipengaruhi oleh preferensi partisan, klarifikasi dari satu sumber resmi belum tentu diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Strategi komunikasi perlu memanfaatkan pembawa pesan yang dipercaya oleh masing-masing kelompok, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan figur komunitas, agar klarifikasi dapat menjangkau kelompok yang paling rentan terhadap narasi provokatif (Muhtadi & Wihardja, 2024).

KESIMPULAN

Konflik sosial yang dipicu oleh disinformasi digital menjelang pemilu merupakan bentuk bencana buatan manusia yang bersifat berulang, berpola, dan semakin kompleks. Literatur yang dikaji menunjukkan kesinambungan ancaman sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2019, hingga Pemilu 2024 yang ditandai kemunculan konten *deepfake*. Kerentanan tersebut bersumber dari tiga lapisan yang saling memperkuat, yaitu keretakan identitas di masyarakat, ekosistem informasi yang memudahkan amplifikasi narasi provokatif, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam membaca sinyal awal. Secara teoretis, temuan ini menguatkan pandangan

bahwa disinformasi pemilu merupakan krisis yang merayap sekaligus risiko sistemik sehingga penanganannya tidak dapat diserahkan kepada satu sektor. Strategi antisipatif yang efektif mencakup enam komponen, yaitu intelijen bencana berbasis indikator kerawanan, pemantauan digital berbasis *big data* dan kecerdasan artifisial, sistem peringatan dini prediktif, penguatan literasi digital dan *prebunking*, kolaborasi multipihak, serta tata kelola berbasis hak asasi manusia, yang dijalankan sebagai siklus sepanjang tahapan pemilu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, data yang digunakan seluruhnya bersifat sekunder sehingga temuan bergantung pada cakupan dan kualitas literatur yang tersedia. Kedua, studi empiris mengenai dampak *deepfake* dan efektivitas sistem peringatan dini konflik di Indonesia masih terbatas. Ketiga, kerangka strategi antisipatif yang diajukan masih bersifat konseptual dan belum diuji di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa langkah. Bagi pemerintah, Indeks Kerawanan Pemilu, data penanganan hoaks, dan sistem informasi kebencanaan perlu diintegrasikan ke dalam satu platform peringatan dini bencana sosial yang dapat diakses lintas lembaga, disertai regulasi khusus mengenai konten sintetis dalam kampanye politik. Bagi penyelenggara program literasi digital, materi perlu diarahkan pada pilar keamanan digital dan *prebunking* serta menjangkau pula pemilih muda dan berpendidikan. Bagi peneliti selanjutnya, kerangka yang diajukan perlu diuji secara empiris melalui studi kasus di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

DAFTAR REFERENSI

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55*(3), 295–317. doi:10.1080/00074918.2019.1690412

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024*. Jakarta, Indonesia: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Boin, A., Ekengren, M., & Rhinard, M. (2020). Hiding in plain sight: Conceptualizing the creeping crisis. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 11*(2), 116–138. doi:10.1002/rhc3.12193

Djalante, R. (2018). Review article: A systematic literature review of research trends and authorships on natural hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia. *Natural Hazards and Earth System Sciences, 18*(6), 1785–1810. doi:10.5194/nhess-18-1785-2018

Fatmawati, E., Salam, A. M., Susanti, R., Sulaeman, J., & Rafa, M. F. F. (2026). Deepfakes and disinformation: New threats to democracy and information security in Indonesia. *PUBLICA, 18*(2), 679–713. doi:10.15575/jpan.v18i2.57288

Hegre, H., Allansson, M., Basedau, M., Colaresi, M., Croicu, M., Fjelde, H., . . . Vestby, J. (2019). ViEWS: A political violence early-warning system. *Journal of Peace Research, 56*(2), 155–174. doi:10.1177/0022343319823860

Jalli, N., & Idris, I. (2019). Fake news and elections in two Southeast Asian nations: A comparative study of Malaysia general election 2018 and Indonesia presidential election 2019. In *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)* (pp. 138–148). Paris, France: Atlantis Press. doi:10.2991/icdesa-19.2019.30

Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas, 3*(1), 31–44.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024, Januari 17). *Wamenkominfo ungkap langkah*

tangani hoaks Pemilu 2024 [Siaran pers No. 33/HM/KOMINFO/01/2024]. Retrieved from https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/817591/siaran-pers-wamenkominfo-ungkap-langkah-tangani-hoaks-pemilu-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Katadata Insight Center. (2023). *Status literasi digital di Indonesia 2022*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the "post-truth" era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6*(4), 353–369. doi:10.1016/j.jarmac.2017.07.008

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies, 49*(3), 411–427. doi:10.1080/14672715.2017.1341188

Maharani, T. D., Sarjito, A., Marnani, C. S., Almubaroq, H. Z., & Falefi, R. (2023). Separatist and terrorist movements in Papua: The challenges of social disaster management and the important role of human-made disaster intelligence. *Jurnal Pertahanan, 9*(3), 443–457. doi:10.33172/jp.v9i3.14659

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2023). *Hoaks di Indonesia tahun 2022*. Jakarta, Indonesia: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.

Muhtadi, B., & Wihardja, M. M. (2024). *Deepfakes and selective belief: How partisanship affects voters' exposure and susceptibility to deepfake content* (ISEAS Perspective No. 2024/58). Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Mujani, S., & Kuipers, N. (2020). Who believed misinformation during the 2019 Indonesian election? *Asian Survey, 60*(6), 1029–1043. doi:10.1525/as.2020.60.6.1029

Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review, 29*(4), 101717. doi:10.1016/j.ibusrev.2020.101717

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences, 25*(5), 388–402. doi:10.1016/j.tics.2021.02.007

Renn, O., Laubichler, M., Lucas, K., Kröger, W., Schanze, J., Scholz, R. W., & Schweizer, P.-J. (2022). Systemic risks from different perspectives. *Risk Analysis, 42*(9), 1902–1920. doi:10.1111/risa.13657

Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications, 5*, 65. doi:10.1057/s41599-019-0279-9

Siahaan, J. T., Alexandra, H. F. S., Sagala, P., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). Peran intelijen strategis terhadap potensi bencana sosial berbasis konflik SARA di Indonesia. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic), 11*(2), 135–141. doi:10.36987/civitas.v11i2.7759

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. doi:10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Tandoc, E. C., Jr., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism, 6*(2), 137–153. doi:10.1080/21670811.2017.1360143

Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: The meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22*(2), 85–97. doi:10.22146/jsp.34614

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science, 359*(6380), 1146–1151. doi:10.1126/science.aap9559

Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia, 41*(2), 255–285.

Yu, M., Yang, C., & Li, Y. (2018). Big data in natural disaster management: A review. *Geosciences, 8*(5), 165. doi:10.3390/geosciences8050165